



Analisis Ekonomi Politik Internasional dalam Studi Kasus Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok Periode 2018-2019

Istanul Badiri

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Indonesia; email

Dikirim: 4 Februari
2020

Direvisi: 15 September
2020

Diterima: 25 September
2020

Dipublikasikan: 31 September
2020

Keywords

*China, Import Tariff,
International Political
Economy, Trade War, United
State of America,*

ABSTRACT

The phenomenon of reciprocal tariffs between the United States and China in 2018 which continued into a trade war between the two countries has successfully attracted the attention of International Relations students around the world. The trade deficit experienced by the United States against China since 2011 reached US \$ 337.18 billion in 2017, the background of the imposition of US \$ 60 billion tariffs imposed by the President of the United States, Donald Trump, on 1,300 types of products from China on 22 March 2018. In response to this, China also provided additional tariffs of US \$ 3 billion on aluminum and steel products from the United States. The trade war between the two countries continues until 2019. Through this paper, the author analyzes the phenomenon of the trade war between the United States and China in the 2018-2019 period through the International Political Economy approach in order to understand the use of economic aspects by a country in achieving its goals. and the interests of the country. By using a case study-based qualitative method, the authors hope to analyze this phenomenon in depth.

Kata Kunci

Amerika Serikat, Ekonomi
Politik Internasional, Perang
Dagang, Tarif Impor,
Tiongkok

ABSTRAK

Fenomena saling berbalas tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada 2018 lalu yang berlanjut menjadi perang dagang antar kedua negara sukses menarik perhatian para penstudi Hubungan Internasional diseluruh dunia. Defisit perdagangan yang dialami oleh Amerika Serikat atas Tiongkok semenjak 2011 hingga menyentuh angka US\$ 337,18 miliar pada 2017 lalu, melatarbelakangi pembebanan tarif sebesar US\$ 60 miliar yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, atas 1.300 jenis produk asal Tiongkok pada 22 Maret 2018. Merespon hal tersebut, Tiongkok turut memberikan tarif tambahan sebesar US\$ 3 miliar atas produk aluminium dan baja asal Amerika Serikat. Kejadian perang dagang antar kedua negara tersebut terus berlanjut hingga tahun 2019. Melalui tulisan ini, Penulis menganalisis fenomena perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada periode 2018-2019 melalui pendekatan Ekonomi Politik Internasional demi memahami penggunaan aspek-aspek ekonomi oleh suatu negara dalam mencapai tujuan dan kepentingan negara tersebut. Dengan menggunakan metode Kualitatif berbasis studi kasus, penulis berharap dapat menganalisis fenomena tersebut secara mendalam.

PENDAHULUAN

Integrasi Tiongkok yang tumbuh cepat ke dalam ekonomi global sejak bergabung menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) melalui telah menimbulkan masalah khusus bagi negara-negara berpenghasilan tinggi, termasuk Amerika Serikat. Nilai ekspor Tiongkok yang terus justru berdampak negatif bagi Amerika Serikat.

Pada 2017, Amerika Serikat dan Tiongkok telah memperdagangkan barang dan jasa senilai US\$ 636 miliar, namun sebagian besar dari jumlah tersebut berasal dari impor Tiongkok ke Amerika Serikat. Ketimpangan dalam neraca perdagangan bilateral Amerika Serikat pun muncul.

Tabel 1. Neraca Perdagangan AS terhadap Tiongkok (dalam US\$ miliar)

Tahun	Ekspor (AS-Tiongkok)	Impor (AS-Tiongkok)	Defisit
2011	133,88	412,41	278,54
2012	144,89	439,83	294,94
2013	160,37	455,52	295,15
2014	169	483,68	314,67
2015	165,1	499,12	334,02
2016	170,15	479,23	309,27
2017	186,83	524,02	337,18

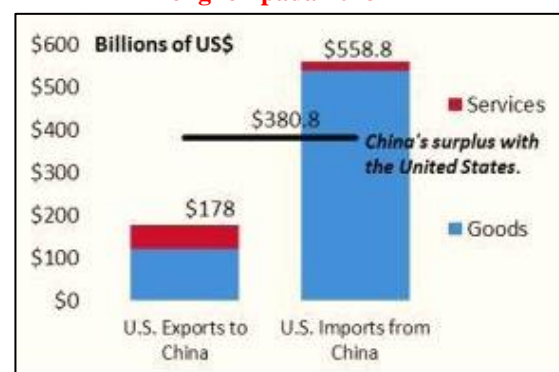
Sumber: Bureau of Economic Analysis, 2017

Dalam upaya memperbaiki neraca perdagangan Amerika Serikat, Presiden Donald Trump selanjutnya merilis berbagai kebijakan. Adapun yang menjadi bagian daripada kebijakan ekonomi luar negeri tersebut adalah menelaah kembali perjanjian-perjanjian perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok.

Amerika Serikat kemudian memutuskan untuk memulai kebijakan menaikkan tarif impor terhadap produk-produk yang berasal dari Tiongkok. Pada 22 Maret 2018 Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka merilis laporan *US Trade Representative* (USTR) yang menyatakan sanksi perdagangan kepada Tiongkok berupa dikenakan tarif impor terhadap lebih dari 1.300 jenis komoditas yang berasal dari

Tiongkok sebesar US\$60 miliar. Pemberian beban tarif bagi Tiongkok tentunya sangat berdampak negatif bagi Tiongkok. Pemasukan terbesar Tiongkok yang berasal dari aktifitas ekonomi ekspor-impor terkena dampak vital karena terjadinya ketimpangan pemasukan devisa Tiongkok. Presiden Tiongkok, Xi Jinping melakukan tindakan pembalasan, merespon kebijakan Trump tersebut. Tiongkok pun mengumumkan biaya tarif atas produk impor Amerika Serikat senilai US\$ 3 miliar pada komoditas aluminium dan baja pada 23 Maret 2018 (Durkin, 2019).

Gambar 1. Nilai Perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok pada 2018



Sumber: Congressional Research Service, 2019

Riset ini penting dalam rangka memahami fenomena perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada periode 2018-2019 melalui kacamata kajian ekonomi politik internasional.

KERANGKA KONSEPTUAL

Ekonomi Politik Internasional

Negara dan pasar merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam perkembangannya. Hal ini disebabkan oleh adanya negara sebagai representasi daripada politik dan pasar sebagai representasi dari ekonomi, yang dalam perjalanannya memiliki keterhubungan satu dengan yang lainnya. Sektor ekonomi yang dekat kaitannya dengan upaya pencapaian kekayaan atau kemakmuran dan dikombinasikan dengan sektor politik yang dekat kaitannya dengan upaya pencapaian kekuatan atau kekuasaan

menjadikan negara dan pasar dalam level internasional disebutkan sebagai inti dari ekonomi politik internasional (Sorensen, 2005).

Melalui kajian ekonomi politik internasional, akan didapatkan gambaran jelas mengenai adanya pertentangan yang muncul antara meningkatkan interdependensi dari ekonomi internasional dengan keinginan negara untuk mengatur ketergantungan ekonomi dan otonomi politiknya karena pada saat yang bersamaan, negara menginginkan keuntungan yang maksimal dari perdagangan bebas yang dilakukan dengan negara lain, tetapi di sisi lain negara juga ingin melindungi otonomi politik, nilai kebudayaan, serta struktur sosial yang dimilikinya (Gilpin, 1987). Dapat dikatakan bahwa kegiatan negara berjalan melalui logika sistem pasar, di mana pasar diperluas secara geografis dan kerja sama antarnegara di berbagai aspek diperluas melalui mekanisme harga, inilah ekonomi politik internasional. Adapun yang menjadi bahasan dalam kajian Ekonomi Politik Internasional terletak pada pola interaksi aktor-aktor politik dengan pasar. Adanya studi ekonomi tidak mampu menjelaskan isu-isu vital didalam distribusi kekayaan dan pola aktivitas ekonomi internasional, dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ekonomi dunia terhadap kepentingan nasional, dan efektivitas dari rezim-rezim internasional yang ada kini. Fenomena-fenomena tersebut justru harus ditilik dari batas-batas politik negara sehingga akan didapatkan gambaran dinamika kebijakan ekonomi suatu negara terhadap negara lainnya.

Adam Smith berpandangan bahwa ekonomi politik adalah “branch of science of a statesman or legislator” serta menjadi panduan pengaturan ekonomi nasional (Gilpin, 1987). Dilain sisi, Mochtar Mas’oed berpandangan bahwa ekonomi politik menitikberatkan kepada studi tentang interaksi serta keterkaitan antara fenomena politik dengan ekonomi, antara lingkungan domestik dan lingkungan internasional, antara negara dan pasar, serta antara pemerintah dengan masyarakat

(Mas’oed, 2008). Kajian ekonomi politik internasional mempelajari dinamika dalam ekonomi global yang berfokus pada pertarungan politik yang terjadi antara yang kuat dan yang lemah dari bursa ekonomi global. Gilpin (2005) yang menyebutkan Ekonomi Politik Internasional kepada “Ekonomi Politik Global” mendefinisikan ini sebagai interaksi pasar dengan aktor-aktor seperti negara, perusahaan multinasional, hingga organisasi internasional. Dampak umum dari kegiatan ini adalah terjadinya kompetisi politik ditingkat nasional dan internasional, yang mana negara kuat akan cenderung mencari lebih banyak menjalin hubungan ekonomi global dalam upaya meningkatkan pendapatan negaranya, sedangkan dilain sisi negara yang lemah berupaya untuk menghilangkan batasan ekonomi ditataran nasional dan global dalam rangka meminimalisir hingga bahkan menghilangkan kerugian yang dapat mereka rasakan. Ekonomi politik internasional sejatinya mempelajari bagaimana pertarungan politik muncul antara negara kuat dan negara lemah dalam percaturan bursa ekonomi global membentuk evolusi ekonomi global (Oatley, 2006).

Menjadi fokus utama dalam kajian ekonomi politik internasional adalah bagaimana dinamika pertarungan politik yang terjadi atau terlaksana antara negara yang kuat dengan negara yang lemah justru membentuk serangkaian kebijakan ekonomi yang dianut oleh pemerintah negara terkait. Dalam upaya memahami perkembangan dalam ekonomi global, diperlukan pula pemahaman berkenaan dengan teori-teori ekonomi, mengetahui pola interaksi politik antarpemerintah, kebijakan domestik dari masing-masing negara, hingga mengenal institusi organisasi politik internasional. Oatley secara umum membagi bidang kaji dalam studi EPI ke dalam empat isu utama, yaitu: (1) Sistem Perdagangan Internasional; (2) Sistem Moneter Internasional; (3) Perusahaan Multinasional (MNCs); dan (4) Pembangunan Ekonomi.

Keempat isu tersebut saling memiliki keterkaitan, permasalahan-permasalahan yang muncul dalam bidang perdagangan, permasalahan multinasional, hingga sistem moneter internasional memiliki peran signifikan dalam dinamika pembangunan ekonomi, akan tetapi keempat isu tersebut tentunya dapat dipelajari secara terpisah.

Para penstudi ekonomi politik internasional yang berfokus sistem perdagangan internasional meneliti bagaimana pertarungan politik yang muncul antara negara kuat dan negara lemah membentuk operasi, kreasi, serta konsekuensi dalam sesuatu tatanan sistem yang terpusat, pada WTO misalnya, dan kerangka perdagangan yang terjadi. Sedangkan yang berfokus pada sistem moneter internasional meneliti bagaimana pertarungan politik yang muncul antara negara kuat dan negara lemah membentuk operasi, kreasi, serta konsekuensi dalam sistem moneter sehingga membentuk kemampuan bertransaksi ekonomi antarnegara. Sedangkan lain lagi yang berfokus pada perusahaan multinasional meneliti bagaimana pertarungan politik yang muncul antara negara kuat dan negara lemah yang dilatarbelakangi oleh aktivitas perusahaan multinasional menjadikan pemerintah meregulasi aktivitas-aktivitas berkenaan dengan perusahaan multinasional. Dan yang berfokus pada pembangunan ekonomi akan meneliti bagaimana pertarungan politik berdampak pada terjadinya perbedaan dalam pengadopsian strategi ekonomi yang berbeda dari tiap-tiap negara dunia. Kebijakan ekonomi luar negeri yang dianut tiap negara dunia tentunya akan berdampak pada peningkatan penggunaan sumber daya negara tersebut. Untuk itu, kajian ekonomi politik internasional hadir sebagai studi yang mempelajari dinamika pertarungan politik yang terjadi antara negara kuat dan negara yang lebih lemah dalam upaya pembentukan kebijakan politik atau ekonomi negara tersebut dalam memaksimalkan sumber daya yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rangkaian Perang Dagang

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak terjadi begitu saja. Peristiwa ini telah bergulir sejak 2016. Namun dalam penelitian ini, Penulis akan berfokus pada rangkaian kejadian yang terjadi pada kurun waktu 2018 hingga 2019. Terdapat berbagai rangkaian peristiwa penting yang menarik perhatian penulis. Berikut dihadirkan rangkaian peristiwa penting terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Rangkaian peristiwa perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok di tahun 2018 dimulai pada tanggal 17 Januari 2018. Saat itu Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengemukakan dalam wawancaranya dengan *Reuters* mengancam akan memberikan denda kepada Tiongkok atas dugaan pencurian HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) namun tanpa memberikan rincian lanjutan (*Reuters*, 2019). Pada 22 Januari 2018, Donald Trump mengenakan pembebanan tarif kepada seluruh negara dunia terkecuali Kanada untuk produk panel surya sebesar 30% dan mesin cuci impor sebesar 20% (*Reuters*, 2019). Sebagai respon atas kebijakan tersebut, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengeluarkan pernyataan yang mengecam langkah AS tersebut dan tidak segan membalas (*MSN*, 2019). Tiongkok kembali bertindak atas Amerika Serikat pada 4 Februari 2018 dengan menginisiasi investigasi dan menerapkan langkah-langkah "anti-subsidi" terhadap produk sorgum asal Amerika Serikat, mengancam biaya US\$1.1 miliar terhadap impor Amerika Serikat (*Durkin*, 2019).

Merujuk dari "Section 232"¹, Amerika Serikat kembali membebaskan tarif impor

¹ Penyelidikan "Section 232" dilakukan di bawah wewenang *Trade Expansion Act of 1962*. Tujuan investigasi adalah untuk mengetahui pengaruh impor terhadap keamanan nasional. Investigasi dapat dimulai berdasarkan aplikasi dari pihak yang berkepentingan, permintaan dari kepala departemen atau lembaga, atau dapat diinisiasi sendiri oleh Sekretaris Perdagangan. Laporan

pada 8 Maret 2018 sebesar 25% untuk produk baja dan 10% untuk produk aluminium yang berasal dari seluruh negara (Reuters, 2019). Kemudian pada 22 Maret 2018, Trump mengumumkan hasil investigasi “Section 301”² dimana AS akan berencana untuk menerapkan tarif, penyelesaian sengketa di *World Trade Organization* (WTO), dan pembatasan investasi di Tiongkok sebagai respon persyaratan transfer teknologi Tiongkok. Membalas rencana tersebut, pada 23 Maret 2018, Tiongkok mengumumkan pembebanan tarif impor sebesar US\$3 miliar pada produk aluminium dan baja asal AS. Pada hari yang sama, AS mengajukan konsultasi dengan Tiongkok di WTO – langkah pertama penyelesaian sengketa – dalam perlindungan kekayaan intelektual (Durkin, 2019).

April menjadi bulan terpadat pada tahun 2018 ditilik dari banyaknya peristiwa sengketa dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Pada 2 April 2018, Tiongkok mengumumkan pengenaan tarif tambahan kepada impor AS sebesar US\$3 miliar, menargetkan 128 jenis produk asal AS, termasuk komoditas agrikultur, buah-buahan, kacang-kacangan, dan babi (Reuters, 2019). Kantor Perwakilan Perdagangan AS (United States Trade Representative) pada 3 April 2018 merilis daftar tarif yang diusulkan untuk impor Tiongkok senilai kira-kira US\$50 miliar, termasuk produk teknologi tingkat tinggi asal Tiongkok (Durkin, 2019). Kementerian Perdagangan Tiongkok pada 4 April 2018 merilis daftar barang yang akan dikenakan tarif, sebesar US\$50 miliar, mencakup 106 produk AS, termasuk kacang kedelai, daging sapi, jagung, beberapa pesawat terbang, dan berbagai kendaraan. Tiongkok juga

mengajukan keluhan kepada WTO mengenai pembebanan tarif baja oleh Amerika Serikat (Reuters, 2019). Pada 16 April 2018, Departemen Perdagangan AS melarang raksasa peralatan telekomunikasi Tiongkok, ZTE, membeli komponen dteknologi dari perusahaan AS selama tujuh tahun, mengatakan perusahaan telah melanggar kesepakatan yang dicapai atas pengiriman ilegal ke Iran dan Korea Utara. Hal tersebut menyebabkan Perdagangan saham ZTE dihentikan di Hong Kong dan Shenzhen (Durkin, 2019). Pada 17 April 2018, Tiongkok mulai memberlakukan kebijakan anti-dumping tepung yang berasal dari AS yang mencapai US\$1 miliar. April yang penuh dinamika saling berbalas tarif ditutup dengan kabar baik. Pada 21 April 2018 *U.S Treasury Secretary*, Steven Mnuchin, mengemukakan bahwa adanya kemungkinan berangkat ke Tiongkok dalam rangka membahas kesepakatan dagang. Sebagai respon, pada 22 April 2018 Menteri Perdagangan Tiongkok mengemukakan bahwa pihaknya telah mendapatkan pesan dari Amerika Serikat untuk membahas perdagangan bilateral di Beijing (MSN, 2019).

Mei 2018 menjadi bulan baik dalam kejadian perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal ini diwujudkan dengan terjadinya serangkaian pertemuan yang membahas resolusi konflik perdagangan yang melibatkan kedua negara tersebut. Tanggal 3-7 Mei 2018 AS dan Tiongkok terlibat dalam pembicaraan perdagangan di Beijing, ini menjadi kali pertama kedua negara akhirnya memutuskan untuk duduk bersama membahas. Pada pertemuan ini AS menuntut agar Tiongkok mengurangi kesenjangan perdagangan sebesar US\$200 miliar dalam waktu dua tahun. Namun pembicaraan berakhir tanpa adanya resolusi (Wong & Koty, 2019). Pada 13 Mei 2018, Trump berkicau pada Twitter yang menyebutkan bahwa Ia dan Xi Jinping sedang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ZTE (MSN, 2019). Membalas kunjungan AS, Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu

Sekretaris kepada Presiden, disiapkan dalam 270 hari, berfokus pada apakah impor tersebut akan mengganggu keamanan nasional. Presiden dapat menyetujui atau tidak dengan rekomendasi Sekretaris

(<https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/section-232-investigations/86-section-232-booklet/file>)

He dan Xi Jinping mengunjungi Washington untuk pembicaraan perdagangan pada 15 Mei 2018 (Andjelic, 2019). Menilai niat baik dari Amerika Serikat, pada 18 Mei 2018, Menteri Perdagangan Tiongkok mengumumkan rencana pemberhentian tarif tepung impor asal AS (Wong & Koty, 2019). Namun Kementerian Luar Negeri Tiongkok kemudian mengemukakan bahwa laporan itu tidak benar (Sebayang, 2018). Pada 20 Mei 2018, AS dan Tiongkok setuju untuk menunda perang dagang setelah Tiongkok dilaporkan setuju untuk membeli lebih banyak barang dari AS (Wong & Koty, 2019). Pada 22 Mei 2018, Tiongkok mengemukakan rencananya untuk menurunkan tarif impor mobil asal AS yang semula 25% menjadi 15%. Tarif ini baru efektif pada 1 Juli. Mei yang baik seketika berubah dikala pada hari yang sama, Donald Trump mengemukakan bahwa dirinya “tidak puas” dengan pembicaraan perihal perdagangan dengan Tiongkok diminggu sebelumnya (Sebayang, 2018). Runut dari kejadian tersebut yakni Donald Trump dalam pernyataannya di Gedung Putih AS pada 29 Mei 2018 mengemukakan bahwa akan menambahkan beban biaya tarif sebesar 25% senilai US\$50 miliar atas impor Tiongkok (Sebayang, 2018). Hal ini menyebabkan perang tarif kembali terjadi.

Babak baru perang dagang pasca resolusi konflik Amerika Serikat dan Tiongkok dimulai pada 15 Juni 2018, Amerika Serikat mengumumkan tanggal 6 Juli efektif biaya impor sebesar 25% senilai US\$34 miliar atas 1.102 produk asal Tiongkok. 284 produk lainnya senilai US\$16 miliar akan dilakukan uji publik. Mengetahui hal tersebut, Tiongkok menjawab dengan pembebanan biaya US\$34 miliar atas produk asal Amerika Serikat (Reuters, 2019). Pada 18 Juni 2018, Donald Trump mengemukakan bahwa telah mengarahkan USTR demi mengidentifikasi produk-produk asal Tiongkok untuk dikenakan tambahan tarif sebesar 10%, apabila Tiongkok menetapkan tarif yang telah diumumkan sebelumnya (Sebayang, 2018). Pada 10 Juli 2018, Amerika Serikat meluncurkan rencana

tarif 10% atas impor Tiongkok senilai US\$ 200 miliar (Reuters, 2019). Amerika kembali membebaskan tarif pada 1 Agustus 2018, Trump memerintahkan Perwakilan Dagang AS (USTR) untuk menaikkan tarif impor barang dari Tiongkok senilai US\$ 200 miliar menjadi 25% dari yang semula diusulkan 10% (Reuters, 2019). Amerika Serikat merilis daftar barang-barang Tiongkok pada 7 Agustus 2018 senilai US\$ 16 miliar untuk dikenai tarif 25%. Tiongkok membalas dengan bea masuk 25% atas barang-barang AS senilai US\$ 16 miliar (Reuters, 2019). Tarif dari kedua negara pun mulai berlaku pada 23 Agustus 2018. Pada 24 September 2018 Amerika Serikat kembali mengumumkan biaya tarif tambahan atas impor Tiongkok sebesar 10 persen yang senilai US\$ 200 miliar yang akan diberlakukan hingga penghujung tahun 2018. Tarif baru ini akan ditingkatkan menjadi 25% pada 1 Januari 2019. Dihari yang sama, Tiongkok membalas dengan pengenaan tarif tambahan atas barang impor AS sebesar US\$ 60 miliar (Sebayang, 2018). Pada 18 Oktober 2018, Tiongkok bersama-sama dengan Uni Eropa (UE) mengajukan keberatan kepada WTO atas biaya tarif yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat untuk produk baja. Amerika Serikat mengajukan permintaan kepada WTO untuk segera membentuk panel penyelesaian sengketa terhadap Tiongkok atas dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual (Durkin, 2019).

Pada 30 November 2018, bersamaan dengan pertemuan antara Tiongkok dan Amerika Serikat dalam forum G20, kedua negara menyetujui untuk diberlakukannya gencatan senjata selama 90 hari atas biaya tarif impor terbaru yang awalnya berlaku 1 Januari 2019 menjadi Maret 2019 selama pembahasan dagang berlangsung antar kedua negara tersebut. Tiongkok pun berkomitmen untuk meningkatkan pembelian produk agrikultur dan energi dari Amerika Serikat, serta secara berkala mengurangi biaya tarif atas produk kendaraan asal Amerika Serikat (Durkin, 2019). Kejadian tersebut menandai babak

terakhir dalam dinamika perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada 2018.

Pada 2019 dimulai dengan serangkaian pembahasan mengenai bidang perdagangan. Pada 24 Februari 2019, Amerika Serikat setuju untuk menunda kenaikan biaya tarif yang semula dijadwalkan 1 Maret 2019 (Reuters, 2019). Pada 8 Mei 2019, Amerika Serikat mengumumkan bahwa biaya tarif yang semula 10% ditingkatkan menjadi 25% dan akan efektif pada 10 Mei 2019 (Reuters, 2019). Merespon hal tersebut, Tiongkok menambah tarif atas produk AS sebesar US\$ 60 miliar. (Andjelic, 2019). Hal tersebut menandai dimulainya babak baru dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2019.

Donald Trump dan Xin Jin Ping dikabarkan berkomunikasi via telepon dan bersepakat untuk melangsungkan pertemuan demi membahas perdagangan pada 18 Juni 2019 (Reuters, 2019). Pertemuan antar kedua negara kembali terjadi pada “G20 Summit” di Osaka, 29 Juni 2019. Donald Trump sepakat untuk tidak lagi mengeluarkan tarif baru atas Tiongkok, dan Tiongkok setuju untuk membeli lebih banyak produk pertanian asal AS (Andjelic, 2019). Pada 1 Agustus 2019, Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengenakan biaya tarif tambahan produk impor Tiongkok sebesar 10% yang senilai US\$ 300 miliar, disamping tarif 25% atau senilai US\$ 250 miliar yang telah dirilis sebelumnya. Trump menyebutkan hal ini disebabkan oleh Tiongkok yang tidak merealisasikan janji pembelian produk pertanian asal Amerika Serikat (Andjelic, 2019). Kementerian Perdagangan Tiongkok menanggapi tarif terbaru yang dirilis oleh Amerika Serikat tersebut dengan menghentikan pembelian produk pertanian asal Amerika Serikat (Andjelic, 2019).

Amerika Serikat pada 13 Agustus 2019 mengumumkan penundaan biaya tarif sebesar US\$160 miliar atas Tiongkok hingga Desember 2019. Hal ini dilakukan demi menghindari dampak buruk terhadap

konsumen asal Amerika Serikat menjelang perayaan Natal (Andjelic, 2019). Pada 23 Agustus 2019, Tiongkok mengumumkan rencana penambahan biaya tarif sebesar 10% atas produk Amerika Serikat senilai US\$ 75 miliar sebagai tanggapan atas biaya tarif yang dirilis oleh Amerika Serikat pada bulan Agustus sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, Amerika Serikat menaikkan seluruh tarif impor Tiongkok yang semula 25% dengan nilai US\$ 250 miliar menjadi 30% dan dari yang semula 10% dengan nilai US\$ 300 miliar menjadi 15%. Tarif baru ini dijadwalkan efektif pada dua periode, pertama pada 1 Oktober dan kedua pada 15 Desember (Andjelic, 2019).

Terhitung tanggal 1 September 2019, seperti yang telah diumumkan sebelumnya, Amerika Serikat mulai menerapkan tarif impor senilai US\$ 125 miliar, adapun barang-barang yang termasuk mulai dari alas kaki, popok, produk makanan, jam tangan pintar, mesin pencuci piring, dan televisi. Disisi lain, Tiongkok juga mulai mengenakan tarif impor senilai US\$ 75 miliar atas produk Amerika Serikat, termasuk tarif sebesar 5% atas impor minyak mentah asal Amerika Serikat (Wong & Koty, 2019). Pada 2 September 2019, Tiongkok mengajukan protes ke WTO atas tarif impor sebesar US\$ 300 miliar yang dikenakan oleh Amerika Serikat. Kementerian Perdagangan Tiongkok mengemukakan bahwa ini adalah kali ketiga, Tiongkok mengajukan protes ke WTO berkenaan dengan tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat atas produk Tiongkok (Wong & Koty, 2019). Merujuk aturan WTO, Amerika Serikat memiliki waktu 60 hari untuk mencoba menyelesaikan perselisihan ini.

Rangkaian penyelesaian masalah perdagangan kembali terjadi pada 5 September 2019, Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat untuk melangsungkan pembicaraan tingkat tinggi berkenaan dengan perdagangan di Washington DC pada awal Oktober (Wong & Koty, 2019). Buah dari pembicaraan antar kedua negara muncul pada 11 September

2019, Tiongkok mengumumkan akan membebaskan 16 jenis produk asal Amerika Serikat yang akan dibebaskan tarif impornya, diantaranya adalah peptisida, pakan binatang, pelumas, dan obat kanker. Rencana ini akan berlaku selama satu tahun, terhitung mulai 17 September 2019 hingga 16 September 2020. Disisi lain, Amerika Serikat juga menunda kenaikan tarif impor Tiongkok senilai US\$ 250 miliar, dari semula 1 Oktober menjadi 15 Oktober, dalam rangka menghormati ulang tahun ke-70 Republik Rakyat Tiongkok (Wong & Koty, 2019). Pada 19-20 September 2019, Amerika Serikat dan Tiongkok mengadakan pertemuan perdagangan tingkat menengah di Washington menjelang pertemuan perdagangan tingkat tinggi yang dijadwalkan Oktober Kedua negara sepakat untuk terus berkomunikasi tentang masalah perdagangan (Wong & Koty, 2019). Dihari yang sama, USTR merilis daftar pembebasan tarif impor terhadap 400 produk Tiongkok, diantaranya adalah bahan kimia, tekstil, hingga prosesor grafis komputer (Reuters, 2019). Pada 23 September 2019, perusahaan-perusahaan asal Tiongkok membeli sekitar 600 ribu ton kedelai asal Amerika Serikat, ditargetkan mencapai 3,5 juta ton pada bulan Oktober (Reuters, 2019).

Pertemuan antara delegasi tingkat tinggi Tiongkok dan Amerika Serikat di Washington DC untuk membahas penyelesaian permasalahan perdagangan yang terjadi diantara keduanya akhirnya dilaksanakan pada tanggal 10-11 Oktober 2019 (Reuters, 2019). Buah dari pertemuan kali ini adalah dirilisnya kesepakatan “Fase 1” yang akan diselesaikan dalam beberapa minggu kedepan. Kesepakatan tersebut berisikan Tiongkok akan membeli produk pertanian asal Amerika Serikat sebesar US\$ 40-50 miliar setiap tahunnya dan memperkuat ketentuan tentang kekayaan intelektual. Disisi lain, Amerika Serikat akan menunda kenaikan tarif impor atas Tiongkok yang dijadwalkan berlaku pada 15 Oktober. Penundaan ini akan berlaku untuk tarif impor yang semula dijadwalkan naik hingga 30% atas produk-produk Tiongkok senilai US\$ 250

miliar (Wong & Koty, 2019). Pada 18 Oktober 2019, Amerika Serikat melalui USTR merilis pembebasan tarif impor sebesar US\$ 300 miliar atas produk asal Tiongkok mulai dari 31 Oktober 2019 hingga 31 Januari 2020. Ini berlaku untuk produk-produk Tiongkok yang dikenakan tarif tambahan sebesar 15% berdasarkan “Section 301” pada Agustus 2019, yang berlaku sejak 1 September 2019 lalu (Wong & Koty, 2019).

Setelah serangkaian penyidikan, pada 1 November 2019 Tiongkok akhirnya memenangkan kasus sengketa dengan Amerika Serikat di WTO. Diputuskan bahwa Tiongkok dapat mengenakan sanksi kompensasi atas impor AS senilai US\$ 3,6 miliar untuk kegagalan AS untuk mematuhi aturan anti-dumping pada produk-produk Tiongkok (Wong & Koty, 2019). Pada 26 November 2019, merilis pedoman baru untuk prosedur jaringan telekomunikasi dalam rangka melindungi jaringan telekomunikasi dari ancaman keamanan nasional. Prosedur ini akan memberikan kekuatan bagi pemerintah Amerika Serikat untuk membatasi perusahaan asal negara tersebut dari mengimpor dan menggunakan teknologi asing dalam infrastruktur domestik mereka (Wong & Koty, 2019). Kesepakatan “Phase 1” yang telah dirilis sebelumnya akhirnya disepakati oleh kedua negara pada 13 Desember 2019. Amerika Serikat sepakat untuk tidak lagi melanjutkan tarif 15% senilai US\$ 160 miliar atas impor Tiongkok yang akan efektif pada 15 Desember 2019. Disamping daripada itu, Amerika Serikat juga akan mengurangi separuh biaya tarif dari 15% menjadi 7,5%. Namun, tarif 25% pada impor Tiongkok senilai US\$ 250 miliar akan dipertahankan, dan pengurangan lebih lanjut akan dikaitkan dengan kemajuan dalam negosiasi perdagangan di masa depan. Tiongkok sendiri telah setuju untuk meningkatkan pembelian barang dan jasa dari AS senilai US\$ 200 miliar selama dua tahun ke depan, menanggukkan pembalasan tarif impor, menerapkan pengamanan properti intelektual, dan memiliki proses pengecualian tarif di tempat.

Disebutkan lebih lanjut bahwa Tiongkok akan mengimpor produk pertanian AS senilai US\$ 40-50 miliar - dalam setiap dua tahun ke depan (Wong & Koty, 2019).

Perang Dagang Amerika Serikat-Tiongkok dalam Pandangan Ekonomi Politik Internasional

Fenomena perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok sejatinya dapat ditinjau melalui kacamata Ekonomi Politik Internasional. Konflik perdagangan antar negara-negara industri maju dunia sejatinya telah terjadi semenjak tahun awal tahun 1990an, kala itu ketika Amerika Serikat bersinggungan dengan Jepang (Akbar, 2013). Namun kini, ditengah interdependensi dunia yang makin menguat, muncul pula pemain baru dalam bidang perdagangan internasional, yakni Tiongkok. Pemerintah Tiongkok yang mengandalkan sektor alat elektronik dan industri semikonduktor berbiaya murah sebagai komoditas utama ekspor Tiongkok ke luar negeri. Komponen dasar daripada komoditas ekspor Tiongkok tersebut sejatinya berasal dari Amerika Serikat. Komponen-komponen tersebut dikirim ke Tiongkok oleh perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat untuk dirakit di Tiongkok. Ketika komponen tersebut selesai dirakit, dan dikirim bentuk jadinya kembali ke Amerika Serikat, hal tersebut kini tercatat sebagai aktivitas impor oleh Amerika Serikat (Amadeo, 2020).

Tiongkok mendapatkan keuntungan tersebut dikarenakan mampu memproduksi barang-barang dengan berbiaya murah dibanding daripada negara lain (Amadeo, 2020). Hal ini berdampak pada konsumen, termasuk yang berasal dari Amerika Serikat, dapat memiliki produk yang lebih murah pula. Didapat bahwa faktor utama Tiongkok mampu memproduksi barang berbiaya rendah disebabkan oleh dua berikut, standar hidup yang rendah dan *exchange rate*.

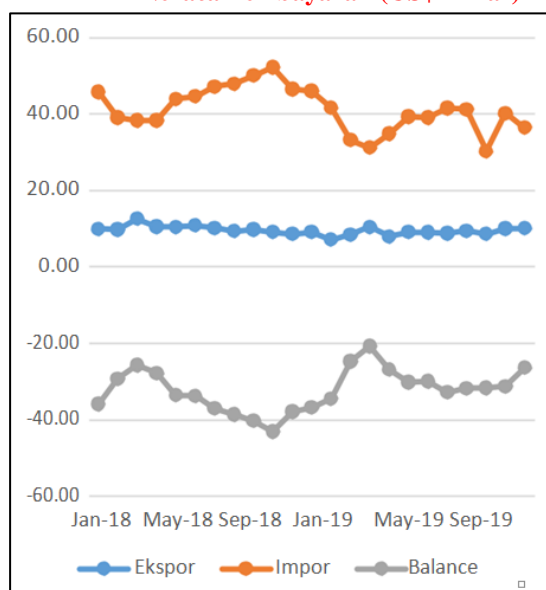
Standar hidup yang rendah memungkinkan perusahaan yang memiliki basis produksi di Tiongkok untuk dapat membayar pekerjanya

dibanding negara lainnya (Amadeo, 2020). Murahny biaya produksi berdampak langsung pada murahny biaya jual suatu produk.

Keuntungan inilah yang berusaha dimaksimalkan oleh Tiongkok untuk menyasar segmen masyarakat tertentu diseluruh dunia, segmen menengah ke bawah. Produk-produk asal Amerika Serikat cenderung memiliki biaya produksi yang lebih mahal daripada Tiongkok disebabkan biaya produksi barang di Amerika Serikat yang lebih tinggi disebabkan oleh standar kehidupannya yang lebih tinggi pula. Dengan kehadiran daripada produk-produk asal Tiongkok, publik menengah ke bawah diwilayah Amerika Serikat kini memiliki pilihan produk yang lebih bervariasi. Logika dasar konsumen, merujuk daripada ilmu ekonomi, cenderung akan membeli produk yang lebih murah dibandingkan dengan produk sejenis lainnya. Kehadiran produk-produk berharga murah inilah yang selanjutnya berdampak pada perlambatan pertumbuhan produk-produk asal dalam negeri Amerika Serikat.

Aktivitas proteksionime, melalui pembebanan tarif oleh Amerika Serikat, merupakan langkah yang dipilih oleh Presiden Donald Trump dalam rangka menjaga agar produk dalam negeri Amerika Serikat yang berkualitas namun cenderung lebih mahal dapat bersaing dengan produk Tiongkok yang memiliki fungsi hampir sama namun dengan biaya yang lebih murah. Inilah alasan mengapa Presiden Trump mengawali pembebanan tarif atas komoditas panel surya dan mesin cuci. Tiongkok telah menjadi pemain penting dalam produksi panel surya secara global. Penambahan pembebanan sektor baja dan aluminium asal Tiongkok pada tahun 2018 lalu turut dilatarbelakangi oleh alasan bahwa sektor ini yang paling berpotensi mengganggu iklim pasar dalam negeri Amerika Serikat.

**Gambar 2. Perdagangan Barang dan Jasa
Amerika Serikat dengan Tiongkok –
Neraca Pembayaran (US\$ miliar)**



Sumber: U.S. Census Bureau, 2020

KESIMPULAN

Fenomena perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada periode 2018-2019 lalu nyatanya berkaitan langsung dengan kepentingan daripada masing-masing negara. Amerika Serikat dengan kepentingannya untuk menstabilkan neraca perdagangan bilateral dengan Tiongkok yang telah defisit semenjak tahun 2011 lalu dan membawa Tiongkok kepada forum negosiasi untuk membahas dugaan pelanggaran HAKI yang dilakukan atas perusahaan dan teknologi asal Amerika Serikat. Disamping daripada itu, pembalasan tarif yang dilakukan oleh Tiongkok sejatinya lebih banyak dilatarbelakangi oleh respon atas kebijakan tarif oleh Amerika Serikat.

Mekanisme proteksionisme yang dilakukan oleh masing-masing negara apabila ditilik melalui kajian Ekonomi Politik Internasional didapat bahwa kedua negara telah menggunakan aspek-aspek ekonomi, dalam hal ini berkaitan dengan bidang perdagangan, dalam rangka mencapai kepentingan nasional masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Y., (2013). *Ekonomi Politik Global 1: Konsep dan Teori*. Ketiga ed. Bandung: PT Refika Aditama.
- Amadeo, K., 2020. *US Trade Deficit With China and Why It's So High*. Dipetik 2 Februari 2020 dari <https://www.thebalance.com/u-s-china-trade-deficit-causes-effects-and-solutions-3306277>
- Andjelic, J., (2019). *Understanding the US China Trade War: Timelines, Statistics, Maps, and More*. Dipetik 29 Desember 2019 dari <https://fortunly.com/statistics/us-china-trade-war#gref>
- Bureau of Economic Analysis, (2017). *U.S. International Trade in Goods and Services*. Dipetik 27 Januari 2020 dari <https://www.bea.gov/news/2018/us-international-trade-goods-and-services-october-2018>
- Congressional Research Service, (2019). *U.S.-China Trade and Economic Relations: Overview*. Dipetik 15 Januari 2020 dari <https://fas.org/spp/crs/row/IF11284.pdf>
- Durkin, A., 2019. *U.S.-CHINA TRADE WAR TIMELINE*. Dipetik 29 Desember 2019 dari <https://tradevistas.org/u-s-china-trade-war-timeline/>
- MSN, 2019. *US-China Trade War: A Timeline*. Dipetik 29 Desember 2019 dari <https://www.msn.com/enin/money/news/us-china-trade-war-a-timeline/ss-AAK9uG7#image=6>
- Reuters, (2019). *Timeline: Key dates in the U.S.-China trade war*. Dipetik 29 Desember 2019 dari <https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-timeline/timeline-key-dates-in-the-us-china-trade-war-idUSKBN1WP23B>
- Sebayang, R., (2018). *Rangkaian Kejadian Penyebab Perang Dagang AS-China*. Dipetik 29 Desember 2019 dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/2018/0/620154637-4-19778/rangkaian-kejadian-penyebab-perang-dagang-as-china/3>
- Wong, D. & Koty, A. C., 2019. *The US-China Trade War: A Timeline*. Dipetik 29 Desember 2019 dari <https://www.china-briefing.com/news/the-us-china-trade-war-a-timeline/>

BIOGRAFI

Istanul Badiri merupakan alumni Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran yang tertarik mengkaji tentang Ekonomi Politik Internasional.